

PARADIGMA BARU MICROFINANCE: PERGESERAN DARI SUBSIDI KE KOMERSIALISASI

Oleh:

¹Rheza Aditya Fajar Firmansyah, ²Dien Mardiyah

^{1,2}Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Airlangga No.4 – 6 Surabaya, 60115.

e-mail: rheza.aditya.fajar-2023@feb.unair.ac.id¹, dienmardhiyah@feb.unair.ac.id²

ABSTRACT

This study discusses the paradigm shift in microfinance from a subsidy-based poverty lending approach toward a sustainable and commercial financial systems approach. Using literature review methods based on Marguerite S. Robinson (2001) and related works such as Yunus (1999), Morduch (1999), and Yaron dkk. (1998), this paper explores the drivers behind this transformation. The case of Bank Rakyat Indonesia's (BRI) Unit Desa demonstrates the success of a commercially viable microfinance model in reaching the poor sustainably without reliance on government subsidies. The findings highlight that professionally managed, market-oriented microfinance can enhance financial inclusion, empower local economies, and strengthen the resilience of low-income communities. Thus, commercialization of microfinance does not diminish its social mission but rather expands its impact through institutional sustainability and financial innovation

Keywords: *Microfinance, Commercialization, BRI Village Unit, Financial Systems Approach, Financial Inclusion*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan paradigma pembiayaan mikro (*microfinance*) dari pendekatan berbasis subsidi (*poverty lending approach*) menuju sistem pembiayaan berkelanjutan yang berorientasi komersial (*financial systems approach*). Melalui kajian literatur dari karya Marguerite S. Robinson (2001) serta literatur terkait seperti Yunus (1999), Morduch (1999), dan Yaron dkk. (1998), artikel ini menelusuri faktor yang mendorong perubahan paradigma tersebut. Studi kasus Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa menunjukkan keberhasilan model microfinance komersial dalam menjangkau masyarakat miskin secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah. Hasil penelitian menegaskan bahwa microfinance berbasis pasar yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan inklusi keuangan, memberdayakan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, komersialisasi microfinance tidak mengurangi tujuan sosialnya, tetapi justru memperluas dampaknya melalui keberlanjutan institusional dan inovasi keuangan..

Kata Kunci: *Microfinance, Komersialisasi, BRI Unit Desa, Financial Systems Approach, Inklusi Keuangan*

PENDAHULUAN

Microfinance atau pembiayaan mikro merupakan salah satu inovasi keuangan yang memiliki dampak besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Sejak akhir 1970-an, berbagai negara berkembang mulai memperkenalkan program kredit mikro berbasis bantuan dan subsidi, yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong kewirausahaan di tingkat akar rumput. Namun, pendekatan tersebut banyak menuai kritik karena bergantung pada pendanaan eksternal, tidak efisien, serta gagal menciptakan lembaga keuangan yang mandiri dan berkelanjutan (Robinson, 2001; Yaron dkk., 1998).

Selama beberapa dekade, pendekatan *poverty lending* yang dikembangkan oleh Grameen Bank dan Muhammad Yunus (1999) berhasil membuktikan bahwa masyarakat miskin dapat menjadi peminjam yang disiplin dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, model tersebut tetap mengandalkan subsidi besar dari donor dan pemerintah, sehingga tidak dapat menjangkau skala yang lebih luas secara berkelanjutan. Robinson (2001) menilai bahwa ketergantungan pada subsidi justru membatasi potensi *microfinance* sebagai sistem keuangan yang inklusif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju sistem keuangan mikro yang berbasis komersial tanpa meninggalkan misi sosial.

Perubahan paradigma ini ditandai dengan munculnya *financial systems approach*, yang menekankan pentingnya keberlanjutan lembaga keuangan melalui profitabilitas, efisiensi operasional, serta kemampuan dalam memobilisasi dana masyarakat. Dalam model ini, lembaga microfinance tidak lagi sekadar menjadi instrumen bantuan, tetapi berperan sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Pendekatan ini menuntut pengelolaan profesional, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), dan penguatan literasi keuangan bagi masyarakat miskin agar dapat menjadi pelaku ekonomi produktif.

Konteks Indonesia menjadi sangat relevan dalam kajian ini. Transformasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Unit Desa merupakan salah satu contoh paling sukses dari penerapan paradigma baru microfinance di dunia. Setelah reformasi perbankan tahun 1983, BRI mengubah model bisnisnya dari penyalur kredit bersubsidi menjadi lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara komersial dan mandiri. Keberhasilan BRI Unit Desa dalam mencapai profitabilitas tanpa subsidi dan tetap melayani masyarakat berpenghasilan rendah menjadikannya model internasional dalam pengembangan keuangan mikro yang berkelanjutan (Wardhana, 2001; OJK, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perubahan paradigma microfinance dari sistem berbasis subsidi menuju pendekatan komersial yang berkelanjutan, serta menganalisis implikasinya terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Evolusi Konseptual *Microfinance*

Konsep *microfinance* berakar pada gagasan bahwa kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan formal. Pada 1950–1970-an, pendekatan yang dominan adalah *charity-based approach*, di mana kemiskinan dipandang sebagai persoalan moral yang diselesaikan dengan bantuan langsung. Model ini berkembang menjadi *subsidized credit approach*, dengan asumsi bahwa masyarakat miskin membutuhkan dukungan finansial bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka.

Namun, pendekatan tersebut mulai dipertanyakan karena ketergantungan tinggi terhadap dana donor dan rendahnya tingkat pengembalian pinjaman (Yaron dkk., 1998). Banyak program kredit bersubsidi gagal mencapai target kelompok miskin, bahkan memperburuk ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, lahirlah gerakan microcredit yang dipelopori oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank pada akhir 1970-an di Bangladesh. Grameen memperkenalkan model group lending dengan tanggung renteng sosial, yang terbukti efektif menurunkan risiko gagal bayar tanpa agunan.

Meskipun Yunus (1999) membuktikan bahwa masyarakat miskin dapat menjadi peminjam yang bertanggung jawab, pendekatan ini tetap bergantung pada subsidi eksternal dan donor internasional. Paradigma poverty lending berfokus pada dimensi sosial, tetapi kurang memperhatikan keberlanjutan finansial lembaga. Robinson (2001) mengkritik hal ini sebagai unsustainable idealism — idealisme sosial yang tidak diimbangi dengan efisiensi ekonomi.

Paradigma Lama: *Poverty Lending Approach*

Pendekatan *poverty lending* menekankan bahwa kredit merupakan hak sosial masyarakat miskin, sehingga bunga pinjaman harus rendah atau bahkan disubsidi. Lembaga keuangan mikro (LKM) berperan sebagai alat pembangunan sosial, bukan entitas bisnis. Pendekatan ini cenderung memisahkan antara dimensi sosial dan finansial dalam sistem keuangan (Yunus, 1999).

Beberapa karakteristik utama pendekatan ini antara lain:

- a) Sumber dana eksternal – pembiayaan berasal dari donor, lembaga internasional, atau pemerintah.
- b) Bunga rendah/subsidi – suku bunga di bawah pasar demi menjaga keterjangkauan kredit.
- c) Tujuan sosial – fokus utama adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.
- d) Skalabilitas rendah – karena ketergantungan pada dana hibah, jangkauan terbatas dan sulit berkembang.

Kelemahan mendasar dari pendekatan ini adalah ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan finansial. Morduch (1999) menjelaskan dilema ini melalui konsep microfinance schism — perdebatan antara “sektor sosial” dan “sektor finansial” dalam microfinance. Ketika lembaga terlalu fokus pada tujuan sosial, mereka kehilangan kemampuan bertahan; sebaliknya, jika terlalu komersial, mereka dianggap mengabaikan misi sosial.

Selain itu, pendekatan ini menciptakan *dependency trap* di mana nasabah terbiasa dengan kredit murah dan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas. Banyak program kredit bersubsidi pada akhirnya gagal, seperti yang terjadi pada *Integrated Rural Development Programs* di India dan beberapa program kredit pertanian di Afrika pada 1980-an (Yaron dkk., 1998).

Paradigma Baru: *Financial Systems Approach*

Sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma lama, Robinson (2001) memperkenalkan paradigma baru yang disebut *financial systems approach*. Pendekatan ini menempatkan lembaga *microfinance* sebagai bagian integral dari sistem keuangan formal yang berorientasi pasar. Robinson berpendapat bahwa kemiskinan tidak semata-mata akibat kurangnya modal, melainkan karena kurangnya akses terhadap layanan keuangan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Model ini menekankan tiga pilar utama:

- a) Keberlanjutan finansial (*financial sustainability*) – lembaga harus mampu menutupi seluruh biaya operasional melalui pendapatan bunga dan jasa layanan, tanpa bergantung pada subsidi.
- b) Kemandirian kelembagaan (*institutional independence*) – lembaga harus memiliki struktur manajemen profesional dan tata kelola yang sehat.
- c) Inklusi keuangan (*financial inclusion*) – meskipun komersial, lembaga tetap memiliki misi sosial untuk melayani masyarakat miskin yang layak kredit (*bankable poor*).

Ledgerwood (2013) menambahkan bahwa keberlanjutan lembaga *microfinance* ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dan teknologi. Dengan digitalisasi, *microfinance* dapat memperluas jangkauan melalui mobile banking, agent network, dan digital scoring tanpa kehilangan efisiensi. Pendekatan ini terbukti berhasil di beberapa negara. Misalnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia menjadi model lembaga *microfinance* komersial paling sukses di dunia. BancoSol di Bolivia dan Bank Dagang Bali di Indonesia juga menunjukkan bahwa profitabilitas dan inklusi sosial dapat berjalan beriringan (Robinson, 2001).

Dimensi Keberlanjutan dan Efisiensi Lembaga Microfinance

Yaron dkk. (1998) mengemukakan dua dimensi utama keberhasilan lembaga *microfinance*:

- a) *Outreach sustainability* – kemampuan lembaga menjangkau segmen masyarakat miskin yang lebih luas.
- b) *Institutional sustainability* – kemampuan lembaga menutupi biaya operasional dan menjaga efisiensi.

Robinson (2001) menyatakan bahwa lembaga seperti BRI Unit Desa telah mencapai kedua dimensi ini secara simultan. Dengan menerapkan bunga pasar dan efisiensi tinggi, BRI mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok desa tanpa subsidi. Data BRI menunjukkan bahwa sejak 1984, Unit Desa telah menghimpun lebih banyak dana tabungan daripada kredit yang disalurkan — menandakan keberhasilan mobilisasi dana lokal.

Selain efisiensi internal, faktor eksternal seperti dukungan kebijakan pemerintah dan regulasi juga berperan penting. OJK (2023) menegaskan bahwa keberhasilan BRI dan lembaga keuangan mikro lainnya di Indonesia tidak lepas dari kerangka regulasi inklusif yang memungkinkan pengawasan prudensial tanpa mengekang inovasi.

Integrasi Sosial-Ekonomi dan Inklusi Keuangan

Pendekatan financial systems menempatkan *microfinance* bukan hanya sebagai alat pembangunan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang inklusif. Morduch (1999) menekankan pentingnya financial deepening — proses peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam sistem keuangan formal. Dengan akses yang lebih luas, masyarakat dapat menabung, mengelola risiko, dan berinvestasi secara produktif.

Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi kunci. Ledgerwood (2013) dan OJK (2023) menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat rentan terhadap eksploitasi, terutama di era digital dan munculnya platform fintech lending. Oleh karena itu, paradigma baru *microfinance* juga menuntut peningkatan kapasitas nasabah, bukan sekadar penyediaan dana.

Lebih jauh, Robinson (2001) menekankan bahwa *financial systems approach* bukanlah sekadar model bisnis, tetapi sebuah revolusi institusional. Ia mengubah cara pandang terhadap kemiskinan: dari objek belas kasihan menjadi subjek ekonomi yang rasional. Pergeseran ini menandai lahirnya konsep inclusive capitalism — di mana pasar

keuangan tidak hanya menjadi domain elit, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat bawah.

Implikasi terhadap Kebijakan dan Perkembangan di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu laboratorium paling berhasil dalam penerapan paradigma baru *microfinance*. Setelah krisis ekonomi 1998, pemerintah dan BRI memperkuat orientasi pasar melalui pengembangan microbanking yang efisien dan digital. Layanan seperti BRI Unit Desa dan Pegadaian Mikro membuktikan bahwa model berbasis profit dapat sekaligus menjadi sarana pemerataan ekonomi (BRI, 2022).

Selain BRI, lembaga seperti Bank Wakaf Mikro, koperasi simpan pinjam, dan fintech P2P lending juga mulai menerapkan prinsip serupa. Namun, perlu kehati-hatian agar komersialisasi tidak mengorbankan perlindungan konsumen dan nilai sosial. Regulasi OJK (2023) menekankan perlunya keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan masyarakat miskin melalui pendekatan literasi dan inklusi.

Sintesis Teoritis

Dari berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa perubahan paradigma *microfinance* merupakan hasil dari pergeseran nilai dan pemahaman tentang kemiskinan itu sendiri. Jika dahulu kemiskinan dipandang sebagai masalah kekurangan dana yang harus disubsidi, kini dipahami sebagai masalah *financial exclusion* — keterpinggiran dari sistem keuangan formal.

Dengan demikian, *financial systems approach* tidak hanya menawarkan solusi finansial, tetapi juga transformasi struktural yang memungkinkan masyarakat miskin menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional. Paradigma ini menjadi fondasi bagi inklusi keuangan modern dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kajian literatur. Sumber utama berasal dari buku *'The Microfinance Revolution'* karya Robinson (2001) serta berbagai literatur akademik, laporan Bank Indonesia, OJK, dan publikasi BRI terkait pembiayaan mikro. Analisis dilakukan dengan menelaah perubahan paradigma, kinerja lembaga keuangan mikro, serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan inklusif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Paradigma Subsidi

Paradigma lama *microfinance* yang berfokus pada bantuan dan subsidi berangkat dari asumsi bahwa masyarakat miskin tidak memiliki kapasitas finansial untuk berinteraksi dengan lembaga komersial. Namun, hasil studi empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa pinjaman bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran, diselewengkan oleh kelompok elit lokal, dan menciptakan ketergantungan psikologis terhadap bantuan (Robinson, 2001). Selain itu, lembaga yang bergantung pada subsidi tidak memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Pergeseran ke Paradigma Komersialisasi

Paradigma baru yang diperkenalkan Robinson (2001) menawarkan alternatif dengan menjadikan *microfinance* sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Dalam

sistem ini, keberlanjutan menjadi prinsip utama: lembaga keuangan mikro diharapkan mampu menutupi biaya operasionalnya melalui pendapatan bunga dan jasa, sambil tetap melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Komersialisasi microfinance bukan berarti meninggalkan tujuan sosial, melainkan menciptakan mekanisme pasar yang efisien agar layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin tanpa batasan dana bantuan.

Studi Kasus: Transformasi BRI Unit Desa

Keberhasilan BRI Unit Desa menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan ini. Setelah deregulasi perbankan tahun 1983, BRI memperkenalkan produk KUPeDES (Kredit Umum Pedesaan) dengan bunga komersial dan tanpa subsidi. Sementara itu, masyarakat juga didorong menabung melalui berbagai skema tabungan mikro seperti SIMPEDES. Pendekatan ini menghasilkan sinergi antara penghimpunan dana lokal dan penyaluran kredit produktif kepada sektor mikro.

Pada akhir 1990-an, meski Indonesia dilanda krisis ekonomi, BRI Unit Desa tetap mencatat laba dan mempertahankan tingkat pengembalian kredit di atas 95% (Wardhana, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mampu menjadi nasabah yang andal jika sistem keuangannya dikelola secara transparan dan profesional.

Implikasi terhadap Pembangunan dan Inklusi Keuangan

Pergeseran paradigma ini membawa implikasi luas terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, *microfinance* komersial mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses kredit dan tabungan di wilayah pedesaan. Kedua, sistem ini memperkuat ketahanan ekonomi lokal, karena masyarakat memiliki alternatif pendanaan di luar pinjaman informal dengan bunga tinggi. Ketiga, model ini meningkatkan keadilan sosial ekonomi, karena menempatkan masyarakat miskin sebagai pelaku ekonomi aktif, bukan penerima bantuan pasif.

Namun, tantangan baru juga muncul, terutama dalam hal digitalisasi layanan dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat tetap terlindungi dari risiko overindebtedness di era fintech dan pinjaman daring.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Paradigma baru microfinance menandai perubahan mendasar dari sistem berbasis subsidi menuju lembaga keuangan yang berorientasi pasar. Transformasi ini, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman BRI Unit Desa, membuktikan bahwa keberlanjutan finansial dapat berjalan seiring dengan tujuan sosial. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat ekosistem mikrofinansial melalui kebijakan yang mendukung inovasi, digitalisasi, dan literasi keuangan. Pengalaman Indonesia dapat menjadi model global dalam mengintegrasikan profitabilitas dengan pemberdayaan ekonomi mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2020). Laporan Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

- Bank Rakyat Indonesia. (2022). Laporan Keberlanjutan BRI 2022. Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Ledgerwood, J. (2013). *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Morduch, J. (1999). The Microfinance Promise. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1569–1614.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Fintech Lending Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Inklusi Keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- PT Pegadaian (Persero). (2022). *Laporan Keberlanjutan Pegadaian 2022*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).
- Robinson, M. S. (2001). *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Wardhana, I. (2001). *Microfinance and the Transformation of BRI Unit Desa: Lessons for Sustainable Rural Banking*. Jakarta: Bank Rakyat Indonesia Research Division.
- World Bank. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank Group.
- Yaron, J., Benjamin, M., & Piprek, G. (1998). *Successful Rural Finance Institutions*. Washington, DC: World Bank Discussion Paper.
- Yunus, M. (1999). *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. New York: Public Affairs. Bandung.